

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Head, John W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS
- Margono, Suyud. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Bahder Johan. 2008. "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Bandung: CV.Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- dan Soleman B. Taneko. 2008. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajawaliGrafindo Persada.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal-Usul dan Perkembangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, R. 1991. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 No.44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undan-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.48. Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.

C. SITUS INTERNET

http://www.academia.edu/3723907/Kedudukan_Peradilan_Adat_dalam_Sistem_Hukum_Nasional?login=&email_was_taken=true&login=&email_was_taken=true,

www.wonosobokab.go.id

Iis mardeli, 2015, Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, journal, <http://e-journal.uajy.ac.id/6945/1/JURNAL.pdf>

